

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah sebuah proses perencanaan kegiatan yang berkesinambungan, bertujuan untuk mewujudkan kemajuan dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Keberhasilan pembangunan sering diukur melalui berbagai indikator, salah satu yang paling signifikan adalah pertumbuhan ekonomi. Tumbuhnya perekonomian ini dapat dilihat dari peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB tidak hanya memberikan gambaran tentang kinerja ekonomi daerah, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan yang telah diterapkan serta dengan tingkat pertumbuhan penduduk perkapita menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah (Prishardoyo, 2008).

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi mempunyai keterkaitan, seiring dengan meningkatnya perkembangan suatu daerah, maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah pun semakin cepat seiring dengan kemajuan pembangunan daerah tersebut (Irwanto, 2016). Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan nasional melalui naiknya kapasitas produksi suatu perekonomian. Suatu Negara mengalami pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP riil, sehingga terjadi keberhasilan (Rapanna & Sukarno, 2017).

Secara teori, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai penambahan output yang disebabkan dari beragam aspek ekonomi dalam periode tertentu (Karun, L.

D., Mintarti, S., 2022). Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sampai mana kegiatan perekonomian dapat meningkatkan pemasukan masyarakat pada periode tertentu. Dasar dari kegiatan tersebut yaitu menghasilkan output melalui faktor-faktor produksi yang akan membentuk balas jasa terhadap masyarakat sebagai pemilik faktor produksi (Putri & Rizal, 2022). Pertumbuhan ekonomi masih menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian secara agregat. Salah satu penyumbang untuk perekonomian Indonesia berada di Provinsi Jawa Timur.

Tenaga kerja dapat dianggap sebagai salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi, dan juga dapat memainkan peran penting dalam mendorong produktivitas pertumbuhan ekonomi sebuah daerah. Pada tahun 2018 di Jawa Timur jumlah penduduk bekerja sebanyak 20.449.949 jiwa dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berjumlah 6.643.543 jiwa merupakan sektor terbanyak penyumbang tenaga kerja dibandingkan dengan 16 sektor lainnya.

Menurut berita resmi BPS Jatim, ekonomi Jawa Timur tahun 2022 tumbuh sebesar 5,34%. Pertumbuhan terjadi di semua sektor usaha kecuali di sektor pertambangan dan penggalian. Tiga sektor yang menjadi penopang utama PDRB Jawa Timur Tahun 2022 yaitu transportasi dan pergudangan (19,47%), jasa lainnya (12,44%), dan penyediaan akomodasi dan makan minum (9,34%). Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur meskipun dilihat dari PDRB tersebut tidak semuanya merata antar wilayahnya. Artinya, masih terdapat kesenjangan antara satu kota dengan wilayahnya.

Tarigan (2005) menjelaskan bahwa keseluruhan pendapatan masyarakat yang bertambah dan terjadi di wilayah itu diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi

wilayah. Pertambahan pendapatan tersebut diukur dinyatakan dalam harga konstan. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHK) Provinsi Jawa Timur tahun 2022 mencapai sebesar Rp. 2.730,91 triliun. Terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 Rp. 2.454,72.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2022, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tertinggi berada di Kota Surabaya sebesar Rp. 434.268,3 Milyar. Diikuti oleh Kabupaten Sidoarjo Rp. 151.613,9 Milyar dan Kabupaten Gresik sebesar Rp. 108.796,9 Milyar. Sedangkan untuk PDRB terendah berada di Kota Blitar dan Kota Mojokerto dengan besaran masing-masing Rp. 5.181,6 dan Rp. 5.253,0 Milyar. Hal ini menandakan bahwa adanya ketimpangan pendapatan yang tidak merata khususnya antara wilayah pusat yaitu, Surabaya dengan wilayah lain diluar Surabaya tersebut.

Jawa Timur yang dikenal sebagai barometer nasional karena memiliki kedudukan dan kontribusi bagi perekonomian nasional. Secara geografis, Jawa Timur merupakan sebuah provinsi yang berpotensi untuk dikembangkan karena karakteristik wilayahnya dan letaknya yang strategis. Berbagai objek wisata seperti pantai, gunung, air terjun, dan lainnya merupakan sebuah keindahan yang ditawarkan oleh provinsi ini. Jawa Timur sendiri dikenal dengan sebutan keuangan kawasan timur Indonesia dan pusat industri (Assidikiyah et al, 2021).

Meskipun Provinsi Jawa Timur mempunyai kedudukan dan kontribusi terhadap perekonomian nasional, masih terdapat beberapa daerah yang kondisi ekonominya jauh apabila dibandingkan dengan Ibu Kota Jawa Timur yakni Surabaya. Mulai dari pendapatan daerah, tingkat kemiskinan, sektor perdagangan,

sektor industri, dan lainnya. Permasalahan utama dalam pembangunan khususnya di Jawa Timur adalah kesenjangan yang terjadi antara daerah pulau Madura dengan daerah dipulau Jawa. Daerah di pulau Madura terbagi menjadi empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep relatif masih tertinggal jika dibandingkan dengan daerah di pulau Jawa seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo dan daerah lain jika dilihat dari capaian PDRB masing-masing daerah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Pdrb Jawa-Madura Wilayah Jatim Tahun 2022

Pulau Jawa	PDRB	Pulau Madura	PDRB
Surabaya	434.268,3	Bangkalan	16.959,9
Gresik	108.796,9	Pamekasan	12.031,6
Sidoarjo	151.613,9	Sampang	14.308,3
Pasuruan	113.352,1	Sumenep	24.912,6

Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Tabel 1.1, menjelaskan perbedaaan tingkat PDRB sangat berbeda jauh. Surabaya sebagai pusat kota memiliki nilai PDRB ADHK tertinggi menurut lapangan usaha sebesar Rp. 434.268,3 milyar diikuti dengan Sidoarjo Rp. 151.613,9 milyar dan Pasuran serta Gresik dengan masing-masing sebesar Rp. 113.352,1 dan Rp. 108.796,9. Hal tersebut berbeda jauh jika dibandingkan dengan daerah di pulau Madura yang statusnya masih sama-sama berada di kawasan Jawa Timur.

Berdasarkan keempat wilayah/Kabupaten di Madura, rata-rata PDRB mereka tidak sampai hingga ratusan milyar. Tertinggi hanya diangka Rp. 24.912,6 (Sumenep) dan terendah Rp. 12.031,6 (Pamekasan). Surabaya sebagai pusat kota juga belum mampu memberi dampak yang maksimal utamanya dalam masalah

pembangunan di pulau Madura yang secara geografis berdekatan dengan Surabaya. Adanya ketimpangan antar daerah tersebut salah satunya dapat diatasi dengan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan dan mengatasi ketimpangan.

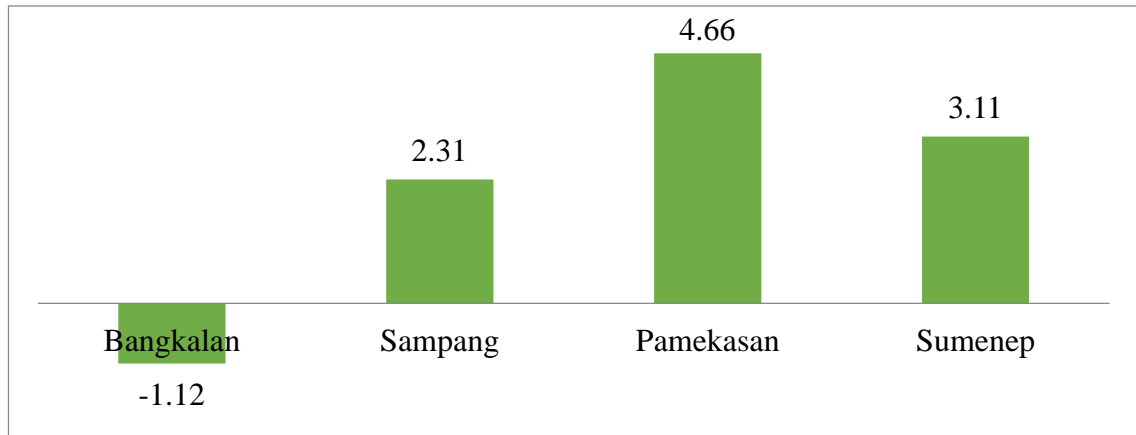
Selain itu, Peranan infrastruktur sangatlah krusial dalam memastikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Infrastruktur yang memadai membantu memastikan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, yang merupakan hak dasar setiap individu. Dengan infrastruktur yang baik, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh akses terhadap layanan-layanan penting tersebut. Ketersediaan infrastruktur mempengaruhi akses dan aktivitas masyarakat terhadap sumber daya yang nantinya menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi (Sudaryadi, 2007). Fasilitas dan akses yang bagus dan memadai biasanya mempunyai tingkat Tingkat kesejahteraan sosial, peningkatan lingkungan sosial, dan kemajuan ekonomi. Penyebaran infrastruktur yang tidak merata antar daerah merupakan permasalahan yang harus di tindaklanjuti agar kesejahteraan masyarakat dapat dicapai.

Tertinggalnya suatu daerah dalam membangun perekonomiannya salah satunya karena kurangnya daya tarik yang disebabkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur yang ada, yang menghambat aktivitas ekonomi. Hal tersebut membuat daerah itu mengalami ketertinggalan dalam proses pembangunan dibanding dengan daerah yang infrastrukturnya lengkap dan memadai.

Rendahnya kualitas pembangunan suatu daerah terjadi karena kurangnya perhatian dan bukan menjadi prioritas apabila dilihat dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tak mengalami peningkatan. Setiap wilayah harusnya mampu

memberikan dampak terhadap perekonomian regional apabila infrastruktur merata di setiap wilayah sehingga tidak mengganggu dan menghambat pertumbuhan ekonomi regional. Sudaryadi (2007), mengatakan bahwa jika hal itu tidak dapat teratasi sebaik-baiknya maka rendahnya ekonomi suatu wilayah dan kemiskinan struktural tidak dapat diatasi karena faktanya struktur jumlah orang miskin berada di wilayah pedesaan.

Tingginya ketimpangan ekonomi antara Kota Surabaya dengan pulau Madura. Beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi hal ini, salah satunya dengan membangun jembatan penghubung antara Surabaya dan Pulau Madura yaitu jembatan Suramadu. Tujuan dari pembangunan tersebut adalah untuk mengatasi ketimpangan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan ini merupakan akses yang efektif guna meningkatkan perekonomian dari Surabaya terhadap Madura (Bangkalan, Sampang, pamekasan dan Sumenep). Ekonomi Jawa Timur, masing-masing Kabupaten/Kota mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif, kecuali Kabupaten Bangkalan dan Bojonegoro, salah satunya Surabaya tumbuh positif sebesar 6,51%. Sangat jauh apabila dibandingkan dengan wilayah-wilayah khususnya di pulau Madura. Secara geografis, Bangkalan paling dekat dengan Surabaya sebagai pusat kota dibandingkan dengan 3 Kabupaten Madura lainnya nyatanya tidak membawa dampak maksimal baik bagi pertumbuhan ekonomi wilayahnya dan tertinggalnya pembangunan. Ketimpangan pembangunan wilayah pulau Madura dengan daerah lain di Pulau Jawa di Jawa Timur terjadi pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Pulau Madura Tahun 2022

Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

Gambar 1.1, menjelaskan tingkat pertumbuhan ekonomi di 4 (empat) Kabupaten pulau Madura, disimpulkan bahwa dari keempat Kabupaten tersebut hanya satu yang mengalami kontraksi yaitu, Kabupaten Bangkalan sebesar 1,12%. Sedangkan Kabupaten Pamekasan mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 4,66%, diikuti Kabupaten Sumenep 3,11% dan Kabupaten Sampang 2,31%. Dari penjelasan diatas, terdapat fakta yang tidak dapat terbantahkan bahwa pembangunan ekonomi wilayah pulau Madura relatif tertinggal dari daerah lain di Pulau Jawa Wilayah Jawa Timur. Selain itu, capaian tingkat pembangunan dimasing-masing 4 (empat) daerah di pulau madura cenderung tidak merata, sehingga hal tersebut tambah menguatkan argumentasi peneliti bahwa perekonomian wilayah madura relatif tertinggal. Dengan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik menyelidiki “Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu terhadap Perekonomian Wilayah Madura”.

1.2. Rumusan Masalah

Tingginya angka ketimpangan wilayah Madura dengan wilayah Kabupaten/Kota Pulau Jawa Provinsi Jawa Timur, sehingga formulasi rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah adanya jembatan Suramadu terhadap perkembangan ekonomi di pulau Madura?
2. Bagaimana strategi pengembangan potensi ekonomi di Pulau Madura?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan sebelum dan sesudah adanya jembatan Suramadu terhadap perkembangan ekonomi di Pulau Madura.
2. Untuk mengetahui dan menentukan strategi dalam pengembangan potensi ekonomi di Pulau Madura.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dan temuan dari penelitian ini nantinya akan berkontribusi pada pengembangan penelitian yang lebih khusus tentang topik penelitian yang relevan. Penelitian ini juga akan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lanjutan yang bertujuan untuk menyelidiki dampak pembangunan infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi regional. Selain itu, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan strategi perencanaan pembangunan. Dengan demikian, pemerintah perlu

mendorong peningkatan kapasitas ekonomi dan mempercepat pembangunan di daerah terbelakang. Melalui temuan-temuan dalam penelitian ini, pemerintah dapat mengidentifikasi kebijakan yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh provinsi.